



# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Dalam pencapaian visi dan misi tersebut Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menetapkan Sasaran Strategisnya yaitu “Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim”. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendukung tugas Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai kewajiban mendukung tugas Sekretaris Kabinet tersebut melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Bidang  
Kepariwisata, Riset dan Teknologi,  
dan Lingkungan Maritim,

M. Arief Khumaidi

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tahun 2017 dibuat dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggaraan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. LKj ini memotret capaian kinerja Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan indikator kegiatan “yang disetujui” oleh Deputy Bidang Kemaritiman, meliputi rancangan rekomendasi kebijakan; rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU; serta rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui Deputy Bidang Kemaritiman tercapai sejumlah 210 berkas. Dari 210 berkas rekomendasi, seluruhnya dimanfaatkan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait. Hal itu berarti rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti tercapai 100% sesuai target.

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, realisasi anggaran berjumlah Rp1.132.409.841, dari total pagu berjumlah Rp1.170.281.000 atau teralisasi sebesar 96,76%.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Bagan/Diagram .....	v
Daftar Gambar .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata- an, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017.....	4
C. Gambaran Aspek Strategis ( <i>Strategic Issues</i> ) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	10
D. Sistematika Penyajian.....	13
<b>BAB II RENCANA KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM TAHUN 2017</b>	<b>14</b>
A. Gambaran Umum Rencana Kinerja Tahun 2017.....	14
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.....	17
C. Ikhtisar IKU Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	19
D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja.....	21
E. Peningkatan Sumber Daya Manusia .....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM 2017</b>	<b>27</b>
A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	27
B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	42
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Rekomendasi.....	48

# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	<b>15</b>
<b>Tabel 2.2</b>	Perjanjian Kinerja .....	<b>18</b>
<b>Tabel 2.3</b>	Indikator Kinerja Utama .....	<b>20</b>
<b>Tabel 2.4</b>	Dinas Luar Negeri Tahun 2017 Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	<b>26</b>
<b>Tabel 3.1</b>	Capaian Sasaran Strategis .....	<b>28</b>
<b>Tabel 3.2</b>	Capaian Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017...	<b>29</b>
<b>Tabel 3.3</b>	Realisasi dan Capaian Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang Disetujui ( <i>Outcome</i> ) Tahun 2017...	<b>30</b>
<b>Tabel 3.4</b>	Kegiatan Pendukung Pencapaian Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017 .....	<b>41</b>
<b>Tabel 3.5</b>	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2017 .....	<b>43</b>
<b>Tabel 3.6</b>	Kategori Pencapaian Kinerja .....	<b>44</b>

# DAFTAR BAGAN/DIAGRAM

<b>Bagan 1.1</b>	Struktur Organisasi Deputi Bidang Kemaritiman .....	<b>9</b>
<b>Diagram 1.1</b>	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	<b>7</b>
<b>Diagram 1.2</b>	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..	<b>8</b>
<b>Diagram 1.3</b>	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan latar Pendidikan Sarjana (S1) .....	<b>8</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b>	Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Ratas Pengembangan 10 Destinasi Prioritas .....	<b>32</b>
<b>Gambar 3.2</b>	Menko Bidang Kemaritiman dan Menteri Pariwisata meresmikan Badan Otorita Borobudur pada tanggal 19 Juli 2017 .....	<b>34</b>
<b>Gambar 3.3</b>	Suasana Rapat Persiapan Pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017, di Sentul, Bogor, tanggal 4 Desember 2017.....	<b>36</b>
<b>Gambar 3.4</b>	Booth Sekretariat Kabinet pada Pameran Sabang Wonderful dan Marine Expo Sail Sabang 2017 .....	<b>38</b>
<b>Gambar 3.5</b>	Presiden meresmikan pengoperasian KEK Mandalika .....	<b>40</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Melalui LKj dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah dan sejauh mana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pentingnya LKj dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain LKj merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di samping itu LKj juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet melaksanakan kinerjanya sesuai dengan standar organisasi secara akuntabel, dinilai oleh *stakeholder*. Diharapkan LKj Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Sekretariat Kabinet dapat memenuhi harapan dalam menyajikan jawaban terhadap tuntutan akuntabilitas publik melalui pelaporan, dan mengungkapkan pencapaian kinerjanya secara efektif dan efisien melalui pengukuran yang baik.

## **A. Latar Belakang**

Dalam sistem presidensial, peranan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting. Dalam menjalankan mandatnya Presiden memerlukan dukungan, baik yang bersifat teknis, administratif dan pemikiran. Dukungan tersebut terutama terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet agar kinerja kabinet terselenggara dengan baik. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet, menyebutkan bahwa Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agar pelaksanaan tugas Sekretaris Kabinet berjalan dengan baik, maka tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah membantu Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang kemaritiman, khususnya bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim melaksanakan program dan berbagai kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. Dalam melaksanakan tugas utamanya melalui kegiatan-kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap

perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim akan menyajikan laporan kinerja sesuai dengan capaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 yaitu sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Laporan kinerja berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2017. LKj ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim selama Tahun 2017 yaitu melalui perbandingan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan indentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 3 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberi dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

## **B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017**

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, pasal 263 menyebutkan bahwa Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

### **1. Fungsi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, ditetapkan bahwa Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;

- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

## **2. Struktur Organisasi**

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, didukung oleh 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu: Kepala Bidang Pariwisata; Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim; Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **a. Kepala Bidang Pariwisata**

Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata.

Kepala Bidang Pariwisata terdiri dari:

(1) Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata; dan

(2) Subbidang Sumber Daya Manusia, Data, dan Informasi Pariwisata.

**b. Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim**

Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset, teknologi, observasi dan informasi maritim.

Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim terdiri dari:

(1) Subbidang Riset, Teknologi, dan Observasi Maritim; dan

(2) Subbidang Data dan Informasi Maritim.

**c. Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam**

Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap

perkembangan umum di bidang lingkungan maritim, kebencanaan, dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal terdiri dari:

- (1) Subbidang Lingkungan Maritim;
- (2) Subbidang Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Jumlah pegawai Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah 10 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 7 Orang, dan staf analis sebanyak 3 orang. Selain itu Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga dibantu pegawai tidak tetap sejumlah 1 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menurut Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana per tanggal 31 Desember 2017 adalah eselon II berjumlah 1 orang, eselon III berjumlah 3 orang, eselon IV berjumlah 3 orang dan analis berjumlah 3 orang. Presentase proporsi jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Diagram 1.1**  
**Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**



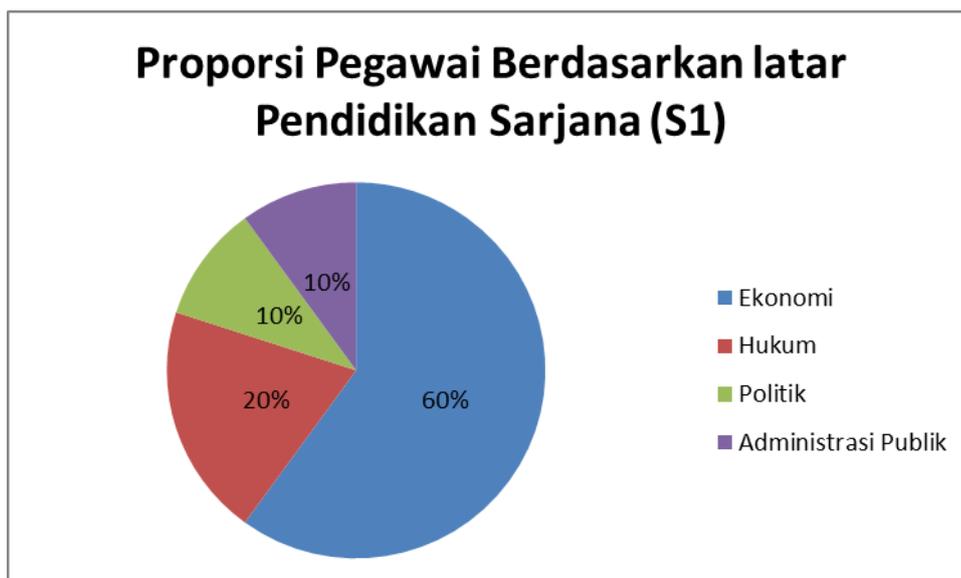
Berdasarkan latar tingkat pendidikan, Sumber Daya Manusia di Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terdiri dari S1 berjumlah 5 orang, dan S2 berjumlah 5 orang, sebagai berikut:

**Diagram 1.2**  
**Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim di lihat dari latar pendidikan S1 dari disiplin ilmu. Sarjana Hukum 2 orang, Sarjana Ekonomi 6 orang, Sarjana Ilmu Politik 1 orang, dan Sarjana Administrasi Publik 1 orang.

**Diagram 1.3**  
**Proporsi Pegawai Berdasarkan latar Pendidikan Sarjana (S1)**

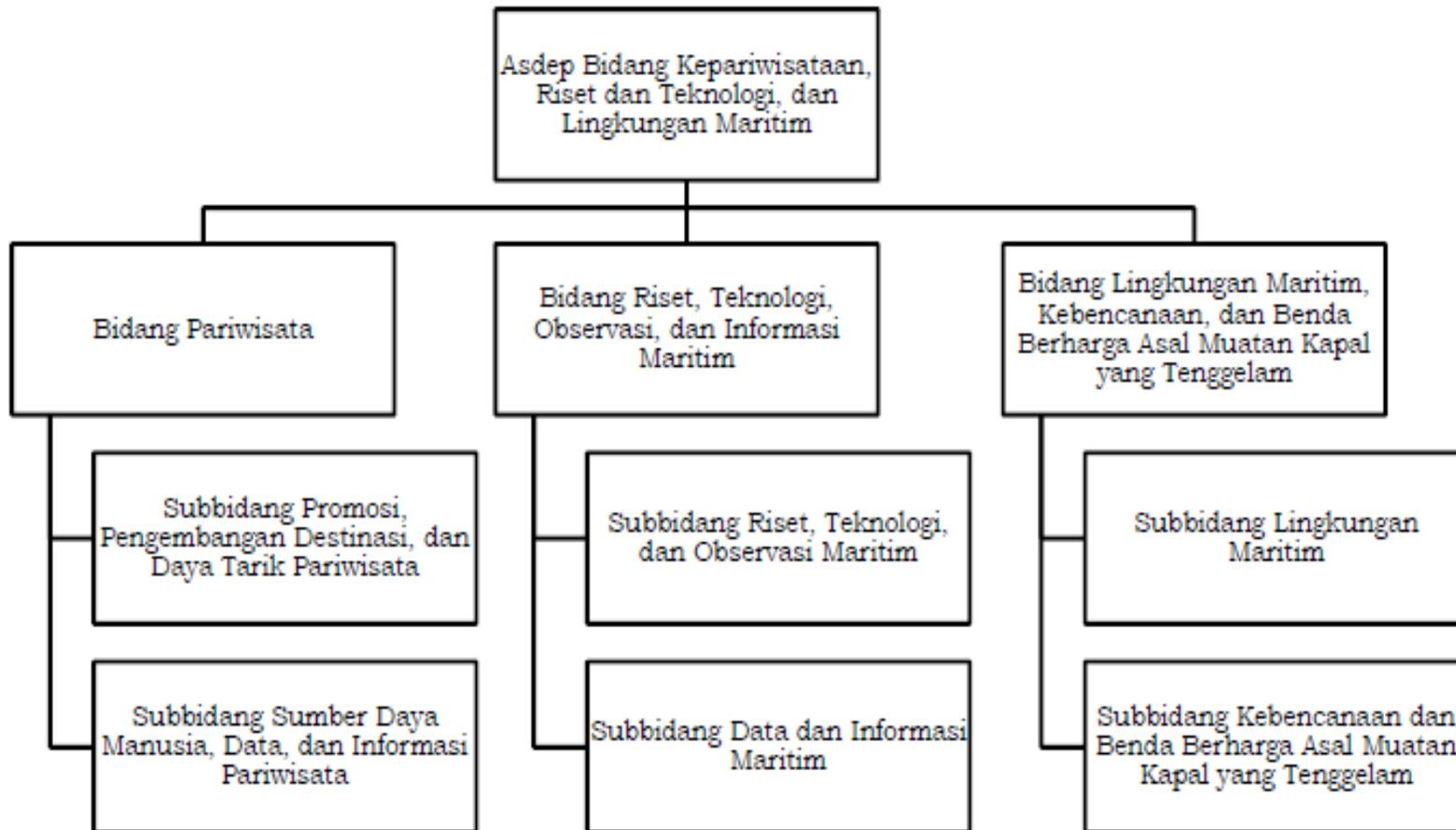


Adapun struktur Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, adalah sebagai berikut:

## Bagan 1.1

### STRUKTUR ORGANISASI

#### ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM



### **C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan, yaitu *memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan*. Memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat Kabinet menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim berperan dalam pencapaian sasaran strategis tersebut melalui output kinerja rekomendasi kebijakan di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Peran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam mendukung keberhasilan pencapaian Tujuan Strategis Sekretariat Kabinet adalah keberhasilannya dalam pencapaian Sasaran Strategis melalui berbagai kegiatan unit kerja dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Sasaran Strategis dimaksudkan sebagai target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang akan dicapai tersebut adalah sebagai berikut:

***Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di Bidang  
Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan  
Maritim***

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim ini diterjemahkan dari Program Teknis Sekretariat Kabinet untuk dilaksanakan pada tingkat Eselon I terkait, yaitu:

***Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet  
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam  
Penyelenggaraan Pemerintahan***

Pelaksanaan Program Teknis Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian sasaran strategis di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim tersebut tercermin dari keluaran (*output*), yaitu kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, melalui kegiatan "Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (Kode Kegiatan 5830)." Nama kegiatan penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 dikelompoknya menjadi tiga *output*, yaitu:

- a. Rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (rekomendasi kebijakan).
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (rekomendasi Persetujuan PUU).
- c. Rekomendasi materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (rekomendasi materi sidang).

Tiga *output* kinerja tersebut merupakan ekstrak berasal dari fungsi-fungsi, yaitu:

- a. *Output* rancangan rekomendasi kebijakan berasal dari fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.
- b. *Output* rancangan rekomendasi persetujuan PUU berasal dari fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.
- c. *Output* rancangan rekomendasi materi Sidang Kabinet berasal dari fungsi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menggunakan SP/SOP yang telah ada dan SOP yang berasal dari penyempurnaan/penyesuaian tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang baru, yaitu rekomendasi sidang kabinet. Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan SP/SOP atas tugas dan fungsi dimaksud, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan, sehingga dapat menggambarkan SP/SOP/panduan yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas profil Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj Tahun 2017 ini.

**Bab II Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017**, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2017.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017.

**Bab IV Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2017 ini dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **BAB II**

# **RENCANA KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM TAHUN 2017**

### **A. Gambaran Umum Rencana Kinerja Tahun 2017**

Dalam rangka mendukung Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet terutama di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan metode pengukurannya. Tujuan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan. Pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017 adalah hasil dari pelaksanaan fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (termasuk dalam menjalankan pengelolaan manajemen kabinet dan arahan Presiden berjalan secara cepat dan tepat, Asisten Deputi Bidang kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dapat mengawal penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden apabila di perintahkan oleh Sekretaris Kabinet). Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, atau

pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mendukung kinerja Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menetapkan sasaran yaitu:

**Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Sasaran terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas dapat tercapai dengan peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan yang di hasilkan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman. Semakin berkualitas rekomendasi tersebut terlihat apabila rekomendasi kebijakan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman tersebut merupakan indikator bahwa rekomendasi telah disetujui.

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	<p><b>Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan</b></p> <p>Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman</p>	Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman

Peningkatan rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui kegiatan perumusan dan analisis rencana kebijakan pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Pemberian rekomendasi demikian harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dianggap tepat apabila ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi kebijakan dimaksud merupakan *output* kinerja pengelolaan manajemen kabinet dalam pengertian arti luas, yang diwujudkan dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang dimanfaatkan untuk memberikan arahan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Arahan tersebut antara lain untuk memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah, mengawasi jalannya program/kegiatan kinerja kementerian/ lembaga; dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

Perpres No. 25 tahun 2015 telah memfungsikan Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretaris Kabinet memaksimalkan fungsi Sekretariat Kabinet. Penambahan fungsi penyeleggaran pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet berpotensi meningkatkan beban kerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Sasaran Strategis tersebut merupakan hasil atau *outcome* yang akan dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Capaian *outcome* tersebut didukung oleh kegiatan ketiga bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, yaitu:

1. Bidang Pariwisata;

2. Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;
3. Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan perumusan dan analisis, penyiapan pendapat atau pandangan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan puu di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hasil rekomendasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dan analisis bahan-bahan terkait dengan substansi masalah kebijakan yang akan disusun.

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga harus memberikan saran kebijakan atas hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan. Pemberian rekomendasi kebijakan harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena rekomendasi kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Suatu rekomendasi kebijakan dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Pemerintah pada umumnya.

## **B. Ringkasan Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Penetapan Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Penetapan kinerja berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi.

Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA**

Satuan Organisasi : Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim  
Tahun : 2017

(1)	(2)	(3)
1. <b>Tewujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	<b>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</b>	<b>100%</b>
	<b>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</b>	<b>100%</b>
	<b>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</b>	<b>100%</b>

Dalam menjalankan Perjanjian Kinerja tersebut Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim didukung pagu anggaran sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Target indikator persentase rancangan rekomendasi yang berkualitas sebesar 100%, digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Deputi Bidang Kemaritiman berarti kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim semakin tinggi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pada tahun 2017 menggunakan alokasi pagu anggaran yang berbeda dari jumlah yang terdapat dalam Penetapan Kinerja 2017. Hal ini dikarenakan pada pertengahan tahun anggaran 2017 terdapat penambahan anggaran sehingga pagu anggaran TA 2017 direvisi, dengan total anggaran berjumlah Rp 1.170.281.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), untuk mendukung kegiatan pada sasaran strategis.

### **C. Ikhtisar IKU Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim di samping telah menetapkan Sasaran Strategis, juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017. Sasaran Strategis dan IKU sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.</li> <li>2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.</li> <li>3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.</li> </ol>	Menunjukkan pencapaian kinerja yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim kepada Deputi Bidang Kemaritiman

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut di atas sebagaimana dalam perjanjian kerja, digunakan ukuran yaitu “disetujui”. Indikator persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman, maka semakin tinggi pula capaian Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan rekomendasi kebijakan berupa hasil analisis dan saran kebijakan dan hasil disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Sekretaris Kabinet.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja *outcome*:

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Rumus ini menunjukkan semakin tinggi realisasinya semakin tinggi pencapaian kinerja.

Tahun 2017 Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menetapkan target tepat waktu yang disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan semakin tepat waktu maka semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam melakukan analisis kebijakan pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. Sedangkan indikator ketepatan mencerminkan semakin banyak saran yang diterima oleh *stakeholder* berarti semakin tinggi kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Untuk Tahun 2017 ditetapkan target ketepatan sebesar 100%.

## **D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja**

### **1. Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet dan guna memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menyusun Renstra.

Penyusunan Renstra Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim melalui Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dengan Surat Keputusan Nomor: SK.01/MARITIM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Tim bertugas menyusun Renstra Deputy dan Asisten Deputy di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman. Renstra Kedeputan Bidang Kemaritiman ditetapkan pada tanggal 29 September 2015 dengan visi: “Menjadi Deputy Bidang Kemaritiman yang profesional dan andal dalam mendukung Sekretaris Kabinet menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman.” Sedangkan visi Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah “Menjadi Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang profesional dan andal dalam mendukung Deputy Bidang Kemaritiman menyelenggarakan pemerintahan”.

Visi dimaksud diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut: “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Deputy Bidang Kemaritiman dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang baik (*good governance*)”.

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan unit kerja yang berada di bawah Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

## **2. Penyempurnaan Prosedur Kinerja**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim untuk menyusun pelaksanaan tugas dan fungsi baru terkait dengan Penyusunan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merupakan tugas Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim belum mempunyai SOP dari Sekretaris Kabinet. Oleh karena itu guna mendukung pelaksanaan

tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas dimaksud dalam bentuk Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman Nomor: SE-4/Maritim/7/2017 tanggal 27 Juli 2017. Penyusunan SOP tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas penyusunan rekomendasi sidang kabinet.

Sedangkan dalam rangka melaporkan updating tindak lanjut Arahan/Janji Presiden dan kunjungan Menteri ke luar negeri ke dalam aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Deputi Bidang Kemaritiman mengeluarkan Surat Edaran menunjuk Operator Pelaksanaan SITAP Kedeputian Bidang Kemaritiman melalui SE-05/Maritim/8/2017

### **3. Pengembangan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam era modern saat ini dalam berbagai sektor terkait pemerintah maupun swasta. Dalam sektor pemerintah, dengan adanya teknologi informasi, maka komunikasi dan akses informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dalam rangka mendukung kinerja suatu organisasi. Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah adanya mekanisme pengumpulan data. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempunyai *Standar Operasional Prosedure* (SOP) tentang pengumpulan data berdasarkan pada Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman tentang *Standar Operasional Prosedure* (SOP) tentang pengumpulan data kinerja. Mekanisme pencatatan, pendokumentasian dan pengumpulan data kinerja pada Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem pengagendaan surat masuk dan surat keluar berbasis web (*E-agenda*). *E-agenda* ini dikembangkan untuk mendukung kualitas penyediaan data dan informasi agar lebih optimal, antara lain:

- a. Arsip sudah didokumentasikan dalam bentuk *soft copy* (*paperless*) dan sudah diklasifikasikan menurut bidang dan tugas fungsinya, sehingga akan mempermudah dalam proses pencarian karena sudah terintegrai dengan sistem;

- b. Pencarian data dan berkas pendukung dapat dilakukan dengan sistematis dan saling terintegrasi. Artinya ketika pegawai membutuhkan memo laporan yang pernah disampaikan oleh Deputi Bidang Perekonomian tidak perlu mencari secara manual dari hardcopy, tetapi dicari di E-agenda tersebut dan setelah data ditemukan, pegawai cukup mendownload memo laporan tersebut yang sebelumnya sudah dikonversi menjadi bentuk softcopy;
- c. Informasi jadwal agenda rapat pimpinan dapat diberikan secara cepat;
- d. Terkait penyajian data untuk penyusunan Laporan Kinerja, rekapitulasi data dapat diperoleh kapan saja karena dihitung secara otomatis.

Dengan dikembangkannya sistem E-agenda ini, waktu penyelesaian berkas masuk yang ditangani Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dapat dilihat secara otomatis tanpa menghitung secara manual. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau (*monitoring*) pencapaian kinerja khususnya indikator ketepatan waktu. *Monitoring* ini dapat dilihat secara berkala baik triwulanan, setiap bulan bahkan setiap minggu. Dengan adanya *monitoring* ini dapat dilihat pencapaian ketepatan waktu dalam penyampaian saran kebijakan kepada pimpinan, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Untuk mendukung penghematan pemerintah, dokumen atau arsip berupa surat keluar dan surat masuk telah dilaksanakan elektronik, yaitu berupa *soft copy* dari hasil scan disposisi deputi, hasil analisis, surat keluar maupun surat masuk. Diharapkan melalui penyimpanan dokumen secara elektronik akan memudahkan pelacakan data dan penghematan kertas.

## **E. Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Guna meningkatkan *capacity building* di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti beberapa Diklat, Bimtek, maupun Workshop, yaitu:

1. Pelatihan *Regulatory Impact Analysis* dalam rangka Proses Penerbitan Peraturan Perundang-undangan pada Paket Kebijakan Ekonomi, diikuti oleh

- Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim;
2. Pelatihan *Cost and Benefit Analysis* diikuti oleh Analis Perekonomian Sub Bidang Riset, Teknologi, dan Observasi Maritim;
  3. Pelatihan Infografis dengan Adobe Photoshop/Illustrator diikuti oleh Analis Perekonomian Sub Bidang Data dan Informasi Maritim;
  4. Pelatihan Konselor Internal Bersertifikat "*Basic Counselling*" diikuti oleh Kepala Bidang Pariwisata;
  5. Pelatihan *Great Coaching and Counseling*, diikuti oleh Kepala Bidang Pariwisata;
  6. Diklat *Soul of Speaking* for STAR, diikuti oleh Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim;
  7. Bimtek Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (*Legislative Drafting*), diikuti oleh Kepala Subbidang Lingkungan Maritim, Kepala Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata, dan Analis Perekonomian pada Subbidang Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;
  8. Diklatpim Tingkat IV, diikuti oleh Kepala Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata;
  9. Diklat *Regulatory Impact Assessment* (RIA), diikuti oleh Kepala Subbidang Lingkungan Maritim;
  10. Diklat *Soul of Speaking* for STAR diikuti oleh Kepala Sub Bidang SDM, Data, dan Informasi Pariwisata;
  11. Workshop *Soul of Speaking for PRIME* diikuti oleh Kepala Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata;
  12. Seminar IPTEK Pengembangan Wisata Bahari dan Workshop Internasional Sato Umi, diikuti oleh Analis Perekonomian pada Subbidang Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam dan Analis Perekonomian Sub Bidang Data dan Informasi Maritim;
  13. Workshop Visioning Badan Otorita Borobudur diikuti oleh Kepala Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata dan Analis Perekonomian Sub Bidang Data dan Informasi Maritim; dan
  14. Diklatpim Tingkat III, diikuti oleh Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Selanjutnya pejabat dan pegawai Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga melakukan tugas dinas ke luar negeri dengan tujuan 5 (lima) negara yang melibatkan 10 (sepuluh) orang pejabat dan pegawai dengan data sebagaimana terlampir.

**Tabel 2.4**  
**Dinas Luar Negeri Tahun 2017**  
**Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan**  
**Lingkungan Maritim**

No.	Tanggal Kegiatan	Kegiatan	Peserta
1.	8-12 Maret 2017	<i>Internationale Tourismus Bourse (ITB)</i> Berlin, di Berlin, Jerman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</li> <li>2. Kepala Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata</li> </ol>
2.	25-28 April 2017	The WTTC 17th Global Summit, di Bangkok, Thailand	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pariwisata</li> <li>2. Analis Perekonomian pada Subbidang Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam</li> <li>3. Analis Perekonomian Sub Bidang Data dan Informasi Maritim</li> </ol>
3.	23-28 April 2017	Arabian Travel Market 2017, di Dubai, Uni Emirat Arab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Subbidang Lingkungan Maritim</li> <li>2. Analis Perekonomian Sub Bidang Riset, Teknologi, dan Observasi Maritim</li> </ol>
4.	7-14 November 2017	Kegiatan Explore Indonesia dan Pembicaraan Bilateral di Marrakech dan Rabat, Maroko	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim
5.	8-12 November 2017	Roadshow Sail Sabang 2017, di Langkawi dan Pangkor, Malaysia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim</li> <li>2. Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam</li> </ol>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM TAHUN 2017

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

#### **A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.”** Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan indikator kegiatan yaitu **“yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman”**, meliputi *rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan puu di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.*

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau

Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Kemaritiman, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan didasarkan pada proses sebagai berikut:

1. *Top Down*

Diukur mulai adanya disposisi/arahan Deputi Bidang Kemaritiman sampai dengan diteruskannya saran kebijakan kepada *stakeholder*.

2. *Bottom Up*

Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diteruskannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada *stakeholder*.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis “yang disetujui” dihitung menggunakan rumus 1, dengan hasil capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Sasaran Strategis**

<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<i>Persentase rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%	100%	100%

Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah sebagai berikut:

**1. Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang Disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman**

Maksud rancangan rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman yang disetujui adalah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Disetujui mengandung pengertian bahwa substansi isi dari analisis tersebut adalah tepat. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan

dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *Stakeholder*, dalam hal ini adalah Presiden, Wakil Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dalam hal ini, indikator dalam Sasaran Strategis berbunyi “*Persentase rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman*”, dengan target presentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang diberikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dan disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah 210 berkas. Sejumlah 210 berkas tersebut dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman, yang artinya 210 rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah ditindaklanjuti. Dari jumlah 210 berkas tersebut, rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim berjumlah sebanyak 132 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 25 berkas, dan Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 53 berkas, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017**

No	Uraian	Jumlah
1	Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	132 berkas
2	Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	25 berkas
3	Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	53 berkas
<b>Total</b>		210 berkas

Dua ratus sepuluh berkas rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman selama kurun waktu Januari-Desember 2017 berasal dari capaian empat triwulan tahun 2017. Selama triwulan pertama (Januari-Maret) sebanyak 52 berkas; triwulan kedua (April-Juni) sebanyak 53 berkas; triwulan ketiga (Juli-September) sebanyak 61 berkas; dan triwulan keempat (Oktober-Desember) sebanyak 44 berkas rekomendasi kebijakan yang disetujui. Capaian rekomendasi kebijakan yang disetujui dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Capaian Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang Disetujui (*Outcome*) Tahun 2017**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2017			
			TRIWULAN	OUTPUT	OUTCOME (Kuantitas)	CAPAIAN OUTCOME
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	TW I	52	52	100%
		100%	TW II	53	53	100%
		100%	TW III	61	61	100%
		100%	TW IV	44	44	100%
<b>Jumlah</b>				210	210	100%

Dengan demikian, jumlah berkas saran/rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disampaikan kepada dan disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 210 berkas rekomendasi kebijakan atau 100% dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait.

## **2. Gambaran Capaian Sasaran Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam pencapaian Sasaran terkait hasil rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dapat dilihat antara lain dalam kegiatan berikut:

**a. Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata dalam rangka Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas**

Pada Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 membahas mengenai penajaman program pembangunan kepariwisataan, Presiden menyampaikan arahan agar Menteri Pariwisata didukung menteri lainnya focus dalam membangun 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas, yaitu Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Pemilihan kesepuluh lokasi ini berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya attractiveness, aksesibilitas dan konektivitas, luas area, potensi, serta dukungan komitmen pemerintah daerah.

Dalam Rapat Terbatas tanggal 16 November 2017 di Istana Bogor, Presiden kembali memberikan arahan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk melakukan percepatan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas. Dalam arahnya, Presiden menyampaikan bahwa pada tahun 2018, pengembangan pariwisata akan difokuskan pada 4 (empat) destinasi pariwisata, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Dalam rangka percepatan pengembangan keempat destinasi wisata tersebut, perlu dibuat payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk membuat tim guna penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan tata ruang, kawasan konservasi, sampah, pembebasan lahan, dan sebagainya. Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar dilibatkan dan dimasukkan ke dalam Perpres tersebut, sehingga dapat menjadi satu kesatuan tim untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Arahan Presiden tersebut telah ditindaklanjuti dengan diadakannya rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan mengundang Sekretaris Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Sekretaris Kementerian Pariwisata; Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kemenko Bidang Kemaritiman; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kemenko Bidang Kemaritiman; Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman, Setwapres; dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Kementerian Pariwisata.

Dalam rapat tersebut, disepakati untuk mengefektifkan Tim Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata sesuai Perpres Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, dan melakukan revisi terhadap Perpres Nomor 40 Tahun 2017 dengan memasukkan Kejaksaan RI, BPKP, dan Sekretaris Kabinet sebagai anggota tim.



**Gambar 3.1**  
Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Ratas Pengembangan 10 Destinasi Prioritas

#### **b. Arahannya Presiden untuk Penyelesaian Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai KEK Pariwisata**

Dalam rangka mendukung tugas presiden memutuskan kebijakan dalam Sidang Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman telah menyiapkan bahan masukan kepada Presiden berupa *briefing sheet* melalui memo Deputi Bidang Kemaritiman Nomor M-145/Maritim/3/2017 tanggal 9 Maret 2017.

Dalam memo tersebut disampaikan bahwa Presiden dalam arahannya menyampaikan untuk mendukung pariwisata di Mandalika segera diselesaikan kasus pertanahan. Dari Arahannya Presiden tersebut, menunjukkan bahwa rekomendasi Sekretariat Kabinet dimaksud dimanfaatkan Presiden untuk memberikan arahan dalam Sidang Kabinet.

Menindaklanjuti arahan Presiden pada Ratas tanggal 21 Februari 2017 untuk segera menyelesaikan permasalahan lahan bagi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat, khususnya terkait dengan dasar hukum Rancangan Peraturan Presiden tentang

Pemberian Uang Kerohiman Dalam Penyediaan Tanah untuk Proyek Startegis Nasional, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat antar Kementerian yang dihadiri pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Agung dan BPKP, (wakil dari Kementerian Hukum dan HAM tidak hadir) pada tanggal 8 Maret 2017. Rapat yang di pimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman membahas dan menyepakati hal sebagai berikut:

- 1) RPerpres tidak disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 2) Substansi RPerpres tersebut disepakati untuk memberikan pembatasan yang konkrit mengenai pengertian uang kerohiman (bantuan/santunan); obyek tanah, meliputi tanah negara (BMN/Daerah) dan tanah BUMN; penerima, dengan pembatasan antara lain telah mendiami atau menggarap obyek tanah dalam kurun waktu tertentu dan menimbulkan hak keperdataan, tata cara pemberian kerohiman, dan komponen penilaian penetapan besar uang kerohiman, serta anggaran.
- 3) Untuk penajaman dalam perumusan substansi tersebut dalam RPerpres, dan agar kebijakan pemerintah untuk membantu PTH atas tanah negara tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai itikad baik (menjadi penerima uang kerohiman dimaksud), hal yang terkait dengan tata cara serta kriteria/komponen penilaian bagi PTH yang layak menerima uang kerohiman, perlu dibahas secara komprehensif dengan melibatkan instansi terkait, dan disepakati untuk dikoordinasikan pembahasannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada tanggal 31 Mei 2017 Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, dan diundangkan pada tanggal 2 Juni 2017.

#### **c. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur**

Destinasi wisata Borobudur terletak di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan

oleh Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015. Sesuai dengan arahan Presiden, untuk pengelolaan destinasi Labuan Bajo akan dibentuk Badan Otorita Pengelola sebagaimana Danau Toba. Pengajuan RPerpres telah dilakukan oleh Menko Bidang Kemaritiman melalui surat nomor S.08.001.02.Menko/Maritim/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 kepada Presiden, dan telah diproses oleh Sekretaris Kabinet melalui surat permohonan paraf persetujuan kepada Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Pariwisata, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. RPerpres yang telah mendapatkan paraf kemudian disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memo (nomor M-498/Seskab/04/2017 tanggal 4 April 2017) untuk ditetapkan.

Pada tanggal 11 April 2017, Perpres Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur ditetapkan oleh Presiden.



**Gambar 3.2**

Menko Bidang Kemaritiman dan Menteri Pariwisata meresmikan Badan Otorita Borobudur pada tanggal 19 Juli 2017

#### **d. Rancangan Inpres tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah**

RInpres tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga merupakan Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Juli 2017: “Agar dilakukan konsultasi publik sebelum kebijakan ditetapkan.”

RInpres tersebut dimaksudkan untuk menggantikan Inpres Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dipandang sudah tidak relevan lagi.

RInpres tersebut memberikan Instruksi kepada Para Menteri dan Kepala Lembaga meliputi Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Panglima TNI, Kapolri agar dalam pengambilan kebijakan mengikuti tata cara dalam RInpres. Dalam RInpres dimaksud memuat:

1. Rencana kebijakan yang perlu dilaporkan kepada Presiden, untuk dibahas dan diputuskan dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas;
2. Kewajiban Menteri dan Kepala Lembaga untuk melakukan analisis dampak kebijakan termasuk analisis risiko, dan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan, sebelum kebijakan ditetapkan;
3. Pengendalian dan pengawasan atas hasil Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas
4. Instruksi khusus kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan agar sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
5. Sekretaris Kabinet menyusun lebih lanjut pedoman kegiatan persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas.

Wakil Sekretaris Kabinet dengan memorandum Nomor M-62/Waseskab/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan RInpres tersebut untuk meminta paraf kepada 4 Menteri Koordinator. Dengan surat Nomor B-484/Seskab/Maritim/9/2017 tanggal 15 September 2017 Sekretaris Kabinet menyampaikan RInpres tersebut untuk minta paraf empat Menteri Koordinator. Pada tanggal 1 November 2017 Presiden mendandatangani dan menjadi Inpres Nomor 7 Tahun 2017.

Menindaklanjuti ketentuan khususnya diktum kesebelas bahwa Sekretaris Kabinet menyusun lebih lanjut pedoman kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat

Terbatas, Wakil Sekretaris Kabinet pada tanggal 9 November 2017 menyelenggarakan rapat dengan dihadiri seluruh Deputi dan Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam rangka menyepakati implementasi di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2017 guna menindaklanjuti arahan Sekretaris Kabinet pada Rakor Eselon I tanggal 3 November 2017.



**Gambar 3.3**

Suasana Rapat Persiapan Pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017, di Sentul, Bogor, tanggal 4 Desember 2017

#### **e. Sail Sabang 2017**

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 28 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Sabang Tahun 2017, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet selaku anggota Bidang Promosi, Publikasi, dan Dokumentasi, turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pameran Sabang Wonderful dan Marine Expo, yang merupakan bagian dari kegiatan Sail Sabang 2017, diselenggarakan pada 1 s.d. 5 Desember 2017.

Dalam Pameran tersebut, Sekretariat Kabinet bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata turut serta dengan mendirikan *booth* yang menampilkan foto-foto kegiatan Presiden dalam rangka mendukung Kepariwisata Nasional dan *photobooth* dengan replika Presiden Joko Widodo berlatarkan Pantai Kuta Mandalika. Selain itu, dalam pameran tersebut Deputi Bidang Kemaritiman juga mengadakan kuis bertemakan pariwisata, serta memberikan *goody bag* yang berisikan kaos dan topi kepada para pengunjung yang turut serta dalam kuis dimaksud.

Pemilihan konten pameran yang berkaitan dengan kepariwisataan didasari pada tujuan penyelenggaraan Sail Sabang 2017 yang difokuskan pada “Pengembangan Destinasi Pariwisata”, yang mana tujuan penyelenggaraan sail-sail sebelumnya adalah “Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pengembangan Destinasi Wisata”.

Pada hari pertama pelaksanaan pameran, booth Sekretariat Kabinet mendapatkan kunjungan dari Menteri Pariwisata, yang kemudian menyempatkan untuk berfoto pada *photobooth* dengan replika Presiden Joko Widodo, serta melihat pameran foto-foto kegiatan Presiden. Selain Menteri Pariwisata, turut hadir pula Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) pada tanggal 2 Desember 2017 seusai pelaksanaan puncak acara Sail Sabang 2017 yang dihadiri Wakil Presiden. Dalam kunjungannya ke booth Sekretariat Kabinet, Waseskab juga menyempatkan untuk memberikan hadiah kepada salah satu pengunjung yang turut serta dalam pelaksanaan kuis. Selain itu, Waseskab juga menyempatkan diri untuk berfoto dengan replika Presiden Joko Widodo, serta melihat pameran foto-foto kegiatan Presiden.

Hampir di setiap harinya, *booth* Sekretariat Kabinet selalu dipadati oleh pengunjung, terutama mereka yang ingin turut serta berfoto bersama replika Presiden Joko Widodo. Para pengunjung *booth* Sekretariat Kabinet tidak hanya berasal dari warga sekitar Sabang dan Banda Aceh, namun ada juga beberapa pengunjung yang berasal dari luar negeri. Pengunjung tersebut sebagian besar merupakan wisatawan mancanegara (*wisman*) yang terlibat dalam *International Yacht Rally*, sebagai bagian dari kegiatan Sail Sabang 2017. Para *wisman* tersebut diantaranya berasal dari Selandia Baru, Australia, Belanda, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Thailand.

Pada hari penutupan Pameran Sabang Wonderful dan Marine Expo, tanggal 5 Desember 2017, *booth* Sekretariat Kabinet dan Kementerian Pariwisata berhasil memperoleh penghargaan sebagai Stand Terbaik 1 yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selaku Ketua Bidang Pameran Sail Sabang 2017. Penghargaan tersebut merupakan pengulangan atas prestasi yang diraih booth Sekretariat

Kabinet pada pelaksanaan Sail Tomini 2015, yang mengambil tema Gebyar Batik Tomini.



**Gambar 3.4**  
Booth Sekretariat Kabinet pada Pameran Sabang Wonderful dan Marine Expo Sail Sabang 2017

#### **f. Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika**

Dalam rangka Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Terbatas Proyek Strategis Nasional Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 21 Februari 2017, Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mendampingi Deputi Bidang Kemaritiman untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi di lapangan. Kegiatan pemantauan merupakan pelaksanaan tugas pokok fungsi yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2015 tentang Sekretariat, yaitu pada pasal 20 huruf f.

Latar belakang dilaksanakan kegiatan pemantauan adalah:

1. KEK Mandalika yang ditetapkan melalui PP Nomor 52 Tahun 2014 merupakan salah satu KEK dengan kegiatan utama yang berfokus pada pengembangan pariwisata dan dikelola oleh PT. ITDC. Pada bulan 1 juli 2017 KEK Mandalika telah berumur 3 (tiga) tahun.
2. Menurut pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK, bahwa KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target pariwisata nasional untuk mendatangkan 20 juta wisman, Mandalika sebagai bagian dari destinasi

pariwisata prioritas, maka perlu memantau secara terus menerus perkembangan KEK Mandalika.

Hasil kegiatan pemantauan di lapangan ditemukan perkembangan pelaksanaan proyek yang belum kondisi 100%. Beberapa proyek tersebut perlu diselesaikan untuk menunjukkan KEK Mandalika dapat beroperasi.

Progres infrastruktur di KEK Mandalika:

1. Pembangunan Jalan dan Penataan Kawasan. Jalan sepanjang 4,5 km dari 11 km telah selesai 100%, sisanya diperkirakan selesai pada Juni 2017, sementara penataan Pantai Kuta diperkirakan akan selesai pada Desember 2017 (diupayakan selesai pada Agustus 2017).
2. Pembangunan Masjid Mandalika Tahap I pada lahan seluas ±80.000 m<sup>2</sup> dengan kapasitas ±1.600 jamaah, sampai saat ini telah mencapai 33,49% (diperkirakan tahap 1 selesai pada Agustus 2017).

Progres kesiapan amenities di KEK Mandalika antara lain:

1. Pembangunan Hotel Pullman dan Hotel ClubMed oleh PT ITDC, direncanakan akan selesai pada tahun 2018.
2. Pembangunan Hotel Paramount dan Hotel Westin oleh EBD Bauer, Hotel Royal Tulip oleh PT Lees International Development (LID), serta Hotel X2 oleh PT Elmira Perkasa, sudah pada tahap *Land Use Development Agreement* (LUDA) dengan PT ITDC.
3. Pembangunan hotel oleh Woori Investment and Development Property Co., Ltd dan PT Tataguna Karya Gemilang dan PT Mandiri Maju Bersama (Lippo Group), serta pembangunan solar cell oleh PT Delapan Menit Energy dan pembangunan sirkuit Moto GP oleh ROADGRIP Indonesia & MRK 1, (pada tahap *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan PT ITDC).

Progres penyelesaian masalah lahan:

1. Tahun 2009 ITDC telah memposes HPL seluas 1175 ha, namun hanya seluas 1035 ha yang diberikan HPL, sisa lahan seluas 135,5 ha tidak diberikan HPL karena ada klaim dari masyarakat
2. Lahan seluas 135,3 ha yang sejak tahun 2014 telah menjadi sengketa antara PT ITDC dan masyarakat tersebut pada saat ini telah selesai penanganannya, dengan rincian sebagai berikut adalah lahan seluas 21, 75 ha (Sertifikat HPL sudah diterbitkan BPN) dan lahan

seluas 109 ha telah dilaksanakan pemberian uang kerohiman kepada para penggarap per tanggal 30 April 2017 (sertifikat HPL sudah diterbitkan BPN).

Dari hasil pemantauan tersebut Skretariat Kabinet melaporkan kepada Presiden:

1. Menurut pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK, bahwa KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.
2. Dalam rangka mempercepat pengoperasian KEK, Presiden telah mencanangkan pengoperasian KEK Sei Mangke pada tanggal 27 Januari 2015 dan Tanjung Lesung tanggal 23 Februari 2015.

Pada tanggal 20 Oktober 2017, Presiden dengan didampingi oleh Menko Bidang Perekonomian, Menteri Pariwisata, Menteri BUMN, Sekretaris Kabinet, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat meresmikan pengoperasian KEK Mandalika.



**Gambar 3.5**

Presiden meresmikan pengoperasian KEK Mandalika

#### **g. Kegiatan Pendukung Pencapaian Output**

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka koordinasi dengan K/L terkait maupun pengumpulan data dan penjangkaran *expert opinion*. Kegiatan yang

dilakukan berupa *focus group discussion* (FGD) maupun rapat koordinasi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

**Tabel 3.4**  
**Kegiatan Pendukung Pencapaian Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017**

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara	27 Januari 2017
2.	Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Ratas tanggal 21 Februari 2017	8 Maret 2017
3.	Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Papua	18 April 2017
4.	Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Banten dan Provinsi Bengkulu	10 Mei 2017
5.	Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Gorontalo dan Provinsi Riau	24 Mei 2017
6.	Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) PSN Provinsi Bali dan Provinsi Aceh	8 Juni 2017
7.	Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) PSN Provinsi Papua Barat	14 Juli 2017
8.	Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) PSN Provinsi Sumatera Barat & Sulawesi Barat	17 Juli 2017
9.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	25 Agustus 2017
10.	Rapat RPerpres Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores	20 November 2017
11.	Rapat Tindaklanjuti Arahan Presiden pada Ratas Tentang Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Baru	29 November 2017
12.	Rapat Penyiapan Pelaksanaan Pameran Sabang Wonderful dan Marine Expo Sail Sabang 2017	29 November 2017

#### 4. Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan LKj Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim ini mekanisme pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Data di peroleh dari arsip tahun 2017 yang berada di Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan di Tata Usaha Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yang dikelola secara elektronik. Data di kelompoknya menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau substansi. Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan

administrasi, seperti kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan jamuan dan alat tulis kantor, penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat substansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Dalam laporan Kinerja ini menggunakan data dan dokumen yang bersifat teknis atau substansi tersebut.

Output yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim digunakan untuk mendukung sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman, sehingga jumlah output Asisten Deputi lebih besar dibandingkan dengan output Deputi Bidang Kemaritiman. Hal ini dikarenakan output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim digunakan sebagai input bagi penyusunan sasaran strategis Deputi, sehingga tidak semua output yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menjadi output Deputi Bidang Kemaritiman.

## **B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam rangka mencapai kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim pada tahun 2017 telah didukung oleh pagu anggaran berjumlah Rp 1.170.281.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Dari total realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017 mencapai Rp 1.132.409.841,- Total penyerapan anggaran mencapai 96,76% dari total pagu anggaran tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

### **1. Realisasi Anggaran Tahun 2017 Sasaran Strategis**

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp 1.132.409.841,- dari total pagu

berjumlah Rp 1.170.281.000,- atau 96,76% dan menghasilkan 210 output hasil analisis sehingga rata-rata per 1 output adalah Rp 5.392.427,-.

## 2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Total anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2017 sebesar Rp 1.170.281.000,- dengan target 112 berkas rumusan hasil analisis kebijakan bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dalam pelaksanaannya mampu menghasilkan 210 berkas analisis dengan penggunaan dana sebesar Rp 1.132.409.841. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp5.392.427,- lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp10.448.937,-. Dengan kata lain anggaran yang mampu dihemat sebesar Rp5.056.510,-/output, atau mencapai tingkat efisiensi sebesar 48,39%.

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran untuk meningkatkan kualitas hasil analisis kebijakan ini, terdiri dari jenis alokasi perjalanan dinas, rapat koordinasi, dan honor panitia.

**Tabel 3.5**  
**Akuntabilitas Keuangan**  
**Sasaran Strategis Tahun 2017**

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
<b>Rata-rata Capaian Outcome ditindak lanjuti : 100 %</b>	Laporan Hasil Analisis Kebijakan	Output	Berkas	112	210
	Pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	Input	Rupiah	1.170.281.000	1.132.409.841
		Input rata-rata peroutput	Rupiah	10.448.937	5.392.427
	1. Penghematan Dana	=	Rp 37.871.159 (3,24%)		
	2. Efisiensi	=	Rp 5.056.510 (48,39%)		
	3. Efektifitas	=	% Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)		

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, solusi dan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran untuk indikator kecepatan dan ketepatan dapat dikategorikan **“sangat memuaskan”**. Sasaran capaian indikator “yang disetujui” 100%. Dengan demikian capaian sasaran dapat di kategorikan **“sangat memuaskan”**. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

**Tabel 3.6**  
**Kategori Pencapaian Kinerja**

<b>Keterangan:</b>	
<b>1.</b> 90%- 100%	= Sangat Memuaskan
<b>2.</b> 85 % - 90 %	= Memuaskan
<b>3.</b> 70 % - < 85 %	= Baik
<b>4.</b> 55 % - < 70 %	= Sedang
<b>5.</b> < 55 %	= Kurang baik

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam rangka membantu Deputi Bidang Kemaritiman telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan

dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.

2. Munculnya isu-isu penting bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

Meskipun Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

- 1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan**

Permasalahan ini tercermin dari penyelesaian monitoring arahan Presiden dalam pertemuan yang dihadiri/dipimpin Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dan kunjungan menteri di bidang kemaritiman yang ke luar negeri sehingga mengakibatkan masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang di karenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil rekomendasi. Kurangnya koordinasi ini juga berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Hal ini mengakibatkan kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet masih belum optimal.

- 2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas yang bersifat substantif**

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan. Namun demikian, sebagian besar staf Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Selain itu Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga terkendala jumlah SDM yaitu belum diisinya sejumlah jabatan dan belum diisinya sejumlah analisis di setiap bidang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2017 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai permasalahan, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

## **B. Rekomendasi**

Sebagai unit eselon II, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah berhasil memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang sangat memuaskan. Untuk itu keberhasilan harus dipertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Terkait adanya berkas rekomendasi kebijakan yang tidak tepat waktu atau melebihi SOP yang telah ditetapkan, SDM yang ada dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga perlu lebih ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
3. Pembenahan administrasi persuratan di tingkat eselon II dan administrasi tata usaha persuratan dalam pengelolaan dokumen di tingkat Sekretariat Kabinet yaitu Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SPDE) yang terintegrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet agar secepatnya direalisasikan.
4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.

# LAMPIRAN

## Lampiran I: Perjanjian Kinerja Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Kemaritiman

Satya Bhakti Parikesit

Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang Kepariwisata,  
Riset dan Teknologi, dan  
Lingkungan Maritim

Mohamad Arief Khumaidi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN**  
**TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim

Rp.745.089.000,00

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim                     | Rp.110.807.000,00 |
| 3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim | Rp.94.104.000,00  |

Total Anggaran	Rp.950.000.000,00
----------------	-------------------

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman



Satya Bhakti Parikesit

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata,  
Riset dan Teknologi, dan  
Lingkungan Maritim



Mohamad Arief Khumaidi

## Lampiran II: Matriks Capaian Kinerja

No	Uraian	Jumlah
1	Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	132 berkas
2	Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	25 berkas
3	Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	53 berkas
<b>Total</b>		<b>210 berkas</b>

### Rincian Capaian *Output* Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

#### Januari 2017

No	<i>Output</i>
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Penyampaian Berkas Pertemuan Bilateral dan Seremoni Penandatanganan Asticles of Agreement (AOA) Pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Tanggal 26-30 Juni 2015, di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
2.	Sertifikat Pemenang Dalam Penulisan Berita/Artikel 2016
3.	Penanganan Limbah Minyak di Perairan Batam-Bintan
4.	Permohonan Usulan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2017
5.	Laporan Menghadiri Kegiatan Promosi Wonderful Indonesia pada Industrial Gathering di Melbourne
6.	Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Tugas badan Pelaksanaan Otorita Danau Toba (BPODT)
7.	Permohonan Audiensi Bupati Kepulauan Anambas kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan
8.	Rencana Kegiatan Kementerian Pariwisata yang Diikuti Presiden
9.	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Pariwisata ke London, Beijing dan Shanghai
10.	Rencana Kegiatan BPPT yang Diikuti Presiden
11.	Tindak Lanjut Arahan Presiden pada acara Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba
12.	Laporan Hasil Rakor Pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoa
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1	Bahan Rakor Tindak Lanjut Pengembangan Destinasi Pariwisata Borobudur Tanggal 27 Januari 2017 di Hotel Sheraton Yogyakarta
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin</b>	

**dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

1	Matriks Usulan Ratas terkait Proyek Strategis Nasional/Proyek Prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Aceh
2	Bahan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Jumat, 27 Januari 2017, Pk. 14.00

**Februari 2017**

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Rencana Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang Diikuti Presiden
2.	Laporan Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Peresmian Bandar Udara Rembele
3.	Laporan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada The 9th GEOSS Asia-Pacific Symposium di Tokyo, 11-13 Januari 2017
4.	Laporan Kegiatan Kunjungan Menteri Pariwisata ke Vatikan
5.	Apresiasi atas Dukungan K/L terkait pariwisata Tahun 2017
6.	Rekomendasi atas Permohonan Dukungan Kegiatan dan Rencana Kegiatan yang Mendukung Destinasi Wisata Sungai Musi
7.	Rekomendasi atas Permohonan Peresmian Diorama/Museum Digital "Nusantara", "Ki Sunda", "Wayang Nusantara", dan Taman Air Mancur Sri Baduga Tahap III, tanggal 18 Februari 2017
8.	Permohonan pengesahan Persetujuan tentang Pembentukan Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Pengeaturan Saling Pengakuan Tenaga Kerja Profesional Pariwisata ASEAN
9.	Laporan Hasil Penyuluhan Perkoperasian bagi Kelompok Pra Koperasi Bidang Pariwisata di Kabupaten Toba Samosir Tanggal 22 Februari 2017
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Laporan Rapat Tindak Lanjut Rakor Tingkat Menteri terkait RPerpres Badan otorita pariwisata (BOP) Borobudur
2.	Penyampaian Bahan Rapat RPerpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur di Kemenko Bidang Kemaritiman, Tanggal 21 Februari 2017
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Laporan hasil Pra-ratas Perkembangan PSN
2.	Bahan Rapat Terbatas terkait Tindak Lanjut Pembahasan <i>Nation Branding</i> , Jum'at 3 Februari 2017, pukul 14.30
3.	Briefing Sheet Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara
4.	Briefing Sheet Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

## **Maret 2017**

<b>No</b>	<b>Output</b>
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Laporan kunjungan Kenegaraan Presiden Sri Langka, 8 Maret 2017
2.	Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Sail Sabang 2017
3.	Laporan Kinerja BATAN Tahun 2016
4.	Briefing Sheet Rakor Tingkat Menteri Persiapan sail Sabang 2017
5.	Laporan Menghadiri Rapat Pembahasan Mengenai Progres dan permasalahan dalam pengembangan kek pariwisata
6.	Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Mengenai Pemberian Uang Kerohiman dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional
7.	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas Tentang Pengelola Barang Muatan Kapal Tenggelam
8.	Tindak Lanjut Penanganan Isu Bangkai Kapal Perang Belanda di Laut Jawa
9.	Laporan Menteri Pariwisata pada kegiatan 36th ASEAN Tourism Forum (ATF) di Singapura, tanggal 16-21 Januari 2017
10.	Laporan FGD Dukungan Infrastruktur di KSPN Nusa Peninda, Kab. Klungkung, Bali, 23-24 Februari 2017
11.	Laporan Pelaksanaan ITB 2017, Tanggal 8 s.d. 12 Maret 2017 di Berlin, Jerman
12.	Laporan Kunjungan Kerja Kepala BPPT ke australia
13.	Laporan Hasil Menghadiri FGD Pembangunan Infrastruktur Perikanan dan Pariwisata Anambas, tanggal 4-6 Maret 2017 di Anambas, Provinsi Kepulauan Riau
14.	Laporan Rapat Pembahasan RPerpres tentang Pemberian Uang Kerohiman dalam Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
15.	Laporan Rapat Pembahasan RPerpres tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif
16.	Laporan hasil rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan PLTS Terpusat di Pulaua Papagarang, NTT
17.	Kunjungan Kerja Menteri Pariwisata pada Pameran Pariwisata Internasional ITB Berlin 2017
18.	Usulan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
2.	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Penyampaian Tindak Lanjut Arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 7 Desember 2016 dan Pertemuan dengan Pelaku Industri Jasa Keuangan Tanggal 14 Januari 2016

## April 2017

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Perkembangan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Strategis Lainnya
2.	Laporan Hasil Rapat Penetapan Program Prioritas Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kawasan Industri, Kawasan KEK dan Destinasi Prioritas Pariwisata Tahun 2017
3.	Laporan hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan untuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Tanda Tangan Otentifikasi dan Surat Distribusi Salinan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
2.	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
3.	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.
4.	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Kepada Presiden untuk Membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemaritiman Tahun 2017

## Mei 2017

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Artikel: Pancasila, Fondasi Rumah Besar Indonesia
2.	Artikel: Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1438H
3.	Bahan Masukan terkait Usulan Program Strategis Perioritas di Provinsi Maluku Utara (KEK Pariwisata Morotai)
4.	Laporan Rapat Pembahasan Rencana Investasi Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur dan Pengembangan Cruise Terminal di Semarang
5.	Laporan Rapat Koordinasi Internal Sail Sabang 2017
6.	Bahan paparan Rapat Koordinasi Sail Sabang
7.	Laporan Perjalan Dinas Kepala Badan Pengkajiand an Penerapan Teknologi ke Jepang
8.	Pembangunan Reaktor Daya Eksperimental Indonesia
9.	Laporan Pelaksanaan Arabian Travel Market 2017, tanggal 24-27 April 2017 di Dubai, Uni Emirat Arab
10.	Laporan Hasil Mengikuti FGD Menyongsong BOP Kawasan Pariwisata Borobudur Tanggal 21 April 2017 di Magelang, Jawa Tengah
11.	Laporan Pelaksanaan The WTTC 17th Global Summit, 24 s.d. 28 April 2017 di Bangkok, Thailand
12.	Laporan Kegiatan Internasional Tourismus Borse (ITB) Berlin 2017
13.	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait KEK Mandalika, 26-29 April 2017

14.	Laporan Rapat Pembahasan Rencana Investasi Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur dan Pengembangan Cruise Terminal di Semarang.
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Tanda Tangan Surat Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional
2.	Penyampaian Berkas Peraturan Perundang-undangan
3.	Usulan Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
4.	Laporan Rapat Pleno I Pengharmonisasian RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi
5.	Izin Prakarsa RPP tentang KEK Gelang Batang
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Penyampaian Briefing Sheet Ratas Evaluasi PSN dan Program Prioritas di Provinsi Bengkulu dan Riau
2.	Penyampaian Bahan Pidato Kenegaraan Presiden di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tanggal 16 Agustus 2017
3.	Permohonan Presiden membuka Kongres III Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia dan Acara Puncak Bolon Simbolon 2017
4.	Permohonan Ketua Dewan EITI International untuk bertemu dengan Presiden RI
5.	Penyampaian Matriks PSN dan Usulan Proyek Provinsi Bengkulu dan Provinsi Banten
6.	Permohonan Audiensi dan Dukungan Maratua Jazz & Dive Fiesta
7.	Penyampaian Bahan Kunjungan Kerja Presiden ke Kalimantan Selatan
8.	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas terkait Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Jawa Barat.

## **Juni 2017**

<b>No</b>	<b>Output</b>
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Laporan Kegiatan Promosi Wonderful Indonesia pada INAWEEK 2017 di Shaghai, Tiongkok
2.	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Pariwisata ke Bangkok dan Phuket, Thailand dalam Rangka Menghadiri World Travel and Tourism (WTTC) Global Summit 2017 dan Benchmarking ke Phuket
3.	Laporan Kepala BMKG pada Kegiatan ICG/IOTWMS-XI di Malaysia
4.	Penyampaian Surat Menteri Dalam negeri Nomor III.2/26890/SJ Mengenai Masukan Menteri Dalam Negeri atas Pembentukan Badan Pengelola Keraton Kasunanan Surakarta
5.	Penyampaian Laporan Hasil Rapat Koordinasi Perkembangan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba
6.	Penyampaian Bahan Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Danau Toba
7.	Laporan Perjlanan DInas Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) ke Yordania dan Mesir
8.	Laporan kegiatan Sabang Coral Day 2017, 19-21 Mei di Sabang, Aceh
9.	Laporan Menghadiri Pesta Kesenian Bali XXXIX Tahun 2017
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan</b>	

<b>PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Tanda Tangan Otentifikasi dan Salinan Perpres Nomor 56 Tahun 2017
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Tindaklanjut Arahan Presiden dalam Ratas Evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau
2.	Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Riau
3.	Penyampaian Bahan Audiensi Kedubes Jepang dengan Sekretaris Kabinet
4.	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas Provinsi Bali dan Provinsi Banten
5.	Bahan rapat pra ratas prov Bali dan Aceh
6.	Permohonan Presiden membuka Ekspedisi The World of Gibli
7.	Penyampaian bahan Ratas Provinsi Gorontalo

### **Juli 2017**

<b>No</b>	<b>Output</b>
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Perkembangan pengelolaan KSPN Danau Toba
2.	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Persiapab Penyelenggaraan Widi International Fishing Tournament 2017
3.	Laporan Hasil Rapat Teknis Dukungan Sail Sabang Tahun 2017
4.	Penyampaian Surat Walikota Batam tentang Percepatan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Rempang Galang, dan Penyelesaian Kawasan Hutan di Kota Batam
5.	Laporan Rapat Koordinasi Perkembangan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba terkait Bandara Udara
6.	Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Beijing, Jeju dan Roadshow 5 Kota Australia
7.	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tim Tekrafnas Tahun 2017
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Penyampaian Bahan Ratas Evaluasi Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas lainnya di Provinsi D.I. Aceh
2.	Permohonan Kehadiran Presiden pada Acara Puncak Festival Pesona Meti Kei Tahun 2017
3.	Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Ratas tentang Evaluasi PSN dan Proyek Prioritas Lainnya di Provinsi D.I. Aceh
4.	Laporan Tindak Lanjut Panglima TNI atas Arahan Presiden pada Rapat Terbatas terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Kalimantan Utara
5.	Penyampaian Bahan Ratas Evaluasi Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas lainnya di Provinsi Papua dan Papua Barat
6.	Permohonan Meresmikan Fasilitas Iradiator Gamma Merah Putih
7.	Permohonan Kehadiran Presiden pada Pagelaran Tari Saman Masal 100001 Penari

## Agustus 2017

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Laporan Perjalanan Dinas Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ke Moscow (19-21 Juni 2017)
2.	Laporan Kegiatan Manado <i>International Conference on Tourism Investment</i> , di Manado tanggal 23-24 Mei 2017
3.	Penyampaian Berkas Usulan Universitas Negeri di Kabupaten Tapanuli Utara dalam Mendukung Wisata Danau Toba
4.	Laporan Rapat Koordinasi dan Peluncuran Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
5.	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan untuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo Tengger Semeru
6.	Bahan Sekretaris Kabinet "Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang"
7.	Artikel Masyarakat Sadar Wisata
8.	Permohonan Tambahan DAK T.A 2017 dan Usulan DAK 2018 Kab. Tapanuli Utara
9.	Laporan Kepala BMKG menghadiri 29th Session of Intergovernmental Oceanographic Commission (IC) di Paris, Perancis, 26-29 Juni 2017
10.	Laporan Rapat Koordinasi Survey Usulan Lahan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Wakatobi
11.	Usulan Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten Tapanuli Utara T.A. 2018
12.	Permohonan Pengangkatan Tenaga Non-PNS menjadi CPNS di Kabupaten Tapanuli Utara
13.	Penyampaian Artikel Kenegarawanan Presiden Soekarno dan Panglima Jenderal Soedirman
14.	Clearing House Teknologi Nuklir BATAN
15.	Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian Pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di NTB
16.	Laporan Rencana Kegiatan Sekretariat Kabinet pada Pameran Wonderful Sabang and Marine Expo 2017
17.	Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
18.	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan untuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Laporan Rapat Pembahasan RKeppres tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Aceh dan RKeppres tentang Perubahan Keppres Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Bahan Rapat Koordinasi Penyelesaian Akhir Konsep Peraturan Presiden Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Penyampaian Bahan Ratas Evaluasi Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas lainnya di Provinsi Sumbar dan Sulbar
2.	Laporan Tindak Lanjut Ratas tentang Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Lampung
3.	Penyampaian Pointers Sambutan Presiden pada Pembukaan Eksibisi The World of Ghibli Jakarta
4.	Penyampaian Pointers Sambutan Presiden pada Kunjungan Kerja ke Kabupaten Gayo

	Lues, Provinsi Aceh
5.	Penyampaian Pointers Sambutan Presiden pada Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur

### **September 2017**

<b>No</b>	<b>Output</b>
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Laporan Rapat Persiapan Survey Usulan Lahan Badan Otorita Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru
2.	Usulan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Tapanuli Utara
3.	Penyampaian Artikel penerbangan Destinasi Pariwisata
4.	Laporan FGD Percepatan Pengembangan Wisata Sejarah dan Relifi Hotel Park Lane, Jakarta Tanggal 4 September 2017
5.	Laporan Rapat Evaluasi Struktur Organisasi Deputi Bidang Kemaritimaan
6.	Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Sail Sabang 2017
7.	Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengusulan Lahan Zona Otorita di Kawasan Danau Toba
8.	Permohonan Bupati Klungkung terkait Pembangunan di Kabupaten Klungkung
9.	Kebutuhan Anggaran Kegiatan Pameran Sail Sabang 2017
10.	Laporan Rapat Pembahasan Penyusunan RPerpres Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Belitong Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tanggal 6 September 2017
11.	Laporan FGD Implementasi dan Implikasi Kebijakan Bebas Visa Indonesia Sekretariat Wakil Presiden tanggal 7 September 2017
12.	Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan ke China Bank Development di Tiongkok
13.	Penyampaian Draft Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab) tentang Tim Penyiapan dan Pelaksanaan pada Kegiatan Pameran Sabang Wonderful dan Marine Expo Sail Sabang 2017
14.	Penyampaian bahan audiensi Kedubes Selandia Baru dengan Sekretaris Kabinet
15.	Penyampaian Draft Keputusan Deputi Bidang Administrasi (Kepdepmin) tentang Tim Penyiapan dan Pelaksanaan pada Kegiatan Pameran Sabang Wonderful dan Marine Expo Sail Sabang 2017
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Laporan Evaluasi Tindak lanjut Arahan Presiden terkait PSN
2.	Permohonan Peresmian Pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di NTB
3.	Permohonan Audiensi Sdri. Winda Fitriana kepada Presiden terkait Investasi
4.	Permohonan Audiensi Gubernur Maluku Utara kepada Presiden terkait Persiapan Pelaksanaan Widi International Fishing Tournament (WIFT) 2017
5.	Laporan hasil Mengikuti Rakor Teknis Persiapan Penyelenggaraan Widi International Fishing Tournament (WIFT) tanggal 20 September 2017 di Ternate
6.	Usulan Menteri Pariwisata Penyelenggaraan Rapat Terbatas Mengenai "Nation Branding"
7.	Permohonan Kesiediaan Presiden untuk membuka Widi International Fishing 2017

## Oktober 2017

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Laporan Rapat Evaluasi Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Kabinet
2.	Dukungan dan Kesiapan Melepas Riset Geosains Kelautan
3.	Penyampaian Bahan rapat koordinasi tentang Perkembangan Pengelola KSPN Danau Toba
4.	Laporan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba
5.	Laporan Seminar IPTEK Pengembangan Wisata Bahari dan Workshop Internasional Sato Umi 2017
6.	Penyampaian laporan Singkat Capaian kinerja Kementerian Pariwisata
7.	Laporan perjalanan Dinas Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN) ke Vienna, Austria
8.	Tanggapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PSPS) di Kabupaten Tapanuli Utara
9.	Usulan Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet
10.	Laporan Singkat Pencapaian dan Evaluasi Program LAPAN
11.	Briefing Sheet Rapat Koordinasi Persiapan Sail Sabang Tahun 2017
12.	Laporan Pencapaian dan Evaluasi Program di BATAN
13.	Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Sail Sabang 2017
14.	Permohonan Audiensi Bupati Wakatobi
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
2.	Permohonan Paraf Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Labuan Bajo Flores
3.	Penyampaian Briefing Sheet dan Bahan Rapat Pembahasan RPerpres tentang Badan otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
4.	Laporan Rapat Pembahasan RPerpres tentang BOP Kawasan Pariwisata Labuan Bajo
5.	Laporan Rapat Pembahasan RPerpres tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 2017-2025
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Presiden Meresmikan Pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat
2.	Penyampaian Undangan kepada Presiden untuk Menghadiri Acara Pembukaan Widi International Fishing Tournament 2017 dan Meninjau East IndonesiaMaritime Expo 2017
3.	Permohonan Persetujuan Menghadiri Pembukaan Widi International Fishing Tournament 2017 dan Peninjauan East IndonesiaMaritime Expo 2017, di Maluku Utara

## November 2017

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Intisari Hasil Kajian Dewan Ketahanan Nasional tentang Penguatan Ekonomi Kreatif di Daerah dalam Rangka Mendukung Pariwisata
2.	Laporan Mengikuti Roadshow Sail Sabang 2017 di Malaysia
3.	Laporan Menghadiri Kegiatan <i>Explore Indonesia</i> dan Pembicaraan Bilateral dengan

	Pemerintah Maroko
4.	Intisari Hasil Kajian Dewan Ketahanan Nasional tentang Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan
5.	Konsep Surat Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Hasil Survey Lahan BOP Labuan Bajo Tanggal 20 November 2017
6.	Intisari Hasil Kajian Ketahanan Nasional tentang Percepatan Realisasi Kawasan Ekonomi Khusus Morotai
7.	Laporan Perjalanan Dinas ke Sabang dalam rangka Rapat Koordinasi Persiapan Sail Sabang 2017
8.	Penyampaian Bahan Rapat Tindak Lanjut Hasil Ratas tentang Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Baru
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Data terkait Penyusunan Peraturan Presiden mengenai Bebas Visa Kunjungan
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Kehadiran Presiden pada Acara Puncak Sail Sabang 2017
2.	Penyampaian Arahan Presiden untuk Event <i>Wakatobi Wonderful Festival and Expo</i> (Wakatobi WAVE)
3.	Penyampaian Bahan Ratas Pengembangan 10 Bali Baru
4.	Permohonan Presiden untuk Menghadiri Event Pariwisata “ <i>Lovely December</i> ” dan Perayaan Natal Tahun 2017 di Kabupaten Toraja Utara
5.	Penyampaian Bahan Sambutan Presiden pada Puncak Acara Sail Sabang 2017

## Desember 2017

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Permohonan/Usulan Pembangunan Pelabuhan Wisata di Kabupaten Natuna
2.	Laporan Workshop Visioning Badan Otorita Borobudur
3.	Laporan Rapat Koordinasi tentang Integrated Tourism Master Plan 3 Destinasi Pariwisata Prioritas (Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika)
4.	Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Ratas Pengembangan 10 Destinasi Wisata Prioritas
5.	Laporan Seminar Nasional “Ekonomi Politik Sumber Daya Maritim”
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Bahan Ratas tentang Penanganan Dampak Erupsi Gunung Agung terhadap Sektor Pariwisata Bali
2.	Permohonan Kehadiran Presiden pada Acara Puncak Hari Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2017
3.	Laporan Rapat Koordinasi Panitia Peringatan Hari Nusantara Tahun 2017